

Dua Dekade Bantuan Pembangunan dan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia; Dana Publik untuk Solusi Berkelanjutan

Tim Penyusun Kajian:

Mickael Bobby Hoelman (Peneliti Utama)

Dini Andriani (Asisten Peneliti)

Hamong Santono (Supervisor Kajian)

Dasar Pemikiran, Tujuan dan Pendekatan Kajian

- Kemajuan yang telah dicapai Indonesia
- Kontribusi LSM terhadap kemajuan yang telah dicapai sekaligus implikasinya terhadap sumber dan jumlah pendanaan yang dapat diakses LSM
- Pandemi Covid-19 — peran negara terbatas, peran LSM semakin urgen sekaligus masa depan keberlanjutan LSM yang makin tidak menentu

Tujuan: “menyelidiki model dan mekanisme pendanaan yang paling mungkin dikembangkan bagi LSM di Indonesia melalui berbagai sumber pendanaan, termasuk yang berasal dari sumber—sumber pendanaan Pemerintah”

Pendekatan:

- Studi literatur terkait sejarah dan peran LSM, perkembangan pendanaan LSM, dampak pandemi terhadap pendanaan LSM dan kerangka kebijakan peluang pendanaan LSM
- Wawancara mendalam kepada beberapa pihak (pemerintah, sektor swasta, lembaga donor dan LSM)

Sejarah dan Peran LSM

- Organisasi mulia-sukarela, pelayanan, muncul karena adanya konflik dan ketegangan dimana swasta enggan terlibat dan negara tidak hadir
- Identitas LSM terlalu luas
- Tumbang rezim Soeharto — kontribusi besar LSM, pendanaan asing banyak masuk, penguatan demokrasi, kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi
- Awal reformasi, jejaring LSM baik nasional dan internasional terus menguat
- Satu dekade setelah reformasi — demokrasi dipandang mulai mapan, kehadiran MDGs, menguatnya peran lembaga bantuan bilateral
- Dua dekade setelah reformasi — ketergantungan pada lembaga bilateral terus menguat, Indonesia semakin maju dan membatasi sumber serta jumlah pendanaan. Sektor ketiga (perpanjangan donor)

Indonesia

59
/100

PARTLY FREE

Political Rights

30 /40

Civil Liberties

29 /60

LAST YEAR'S SCORE & STATUS

61 /100 ● Partly Free



Menjaga Akar Rumput

Ketiadaan LSM di akar rumput dalam jangka pendek – menengah dapat menjadi kerugian besar bagi Indonesia di tengah maraknya **defisit pembela demokrasi**



Menjaga Demokrasi

Masyarakat sipil yang kuat [**vibrant and tolerant society**] salah satunya diperankan Oleh LSM untuk menjaga agar Demokrasi senantiasa berdaya mencegah teror, menghindari kekerasan dan mengelola keragaman



Menjaga Politik Kewargaan

Beberapa Pemilu(kada) terakhir menunjukkan **bangkitnya politik identitas**, menurunnya kohesivitas sosial dan nir-toleransi sejalan dengan perkembangan akses ke media sosial (artifisial) yang telah banyak merubah perilaku warga



Foto: [Adi Maulana Ibrahim/Katadata](#)

Situasi Global LSM : tak lagi jenuh, namun Limbung

Masalah Keuangan Akut



- **Globalisasi pandemi** tidak saja menghantam struktur kesehatan dan ekonomi namun juga struktur kerja sama pembangunan
- **Anjloknya hibah bantuan pembangunan bilateral hingga 26%** (2019–2020; DI, 2021)
- **Risiko pemotongan komitmen** besar–besaran

Strategi Pemerintahan



- **Strategi utama hibah bantuan pembangunan resmi semakin bekerja sama lebih erat dengan pemerintah** ketimbang dengan kelompok–kelompok masyarakat sipil LSM
- **Prioritas bantuan pembangunan menunjukkan upaya reformasi dari atas**, bertumpu kepada mitra pemerintah

Rejim Para Kontraktor



- **Nama–nama kontraktor swasta internasional masih mendominasi** pelaksanaan hibah bantuan resmi pembangunan seperti Cardno, Coffey (Tetra Tech Coffey), GRM International (Palladium), SMEC dan McKinsey hingga para pendatang baru seperti Sistemiq (2016)

Covid19 Aid



- **Belanja penanganan Covid19 mendongkrak bantuan pembangunan ke level tertinggi sepanjang masa** (terutama utang)
- Dampak pandemi mendorong lembaga–lembaga donor meninjau ulang cara kerja mereka – menuntut koordinasi dan koherensi lebih ketat dengan pemerintah untuk alasan menanggapi krisis

Lower Middle Income



- **Indonesia kehilangan status pendapatan menengah atas** setelah hanya satu tahun akibat pandemi
- **Hibah pembangunan resmi lambat laun mengalami tren penurunan dan bertransformasi menjadi utang lunak**

Situasi Domestik LSM : menuju Bencana

Krisis Likuiditas Akut



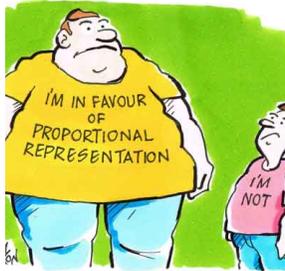
- 72% LSM terkena dampak negatif pada sektor keuangan akibat pandemi COVID-19
- 23% berada pada fase kritis –tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama akibat ketergantungan pendanaan terhadap pihak eksternal
- Sumber: INFID, 2020

Tekanan Biaya Operasional



- Tekanan untuk mengurangi kapasitas operasional dengan cepat agar dapat mempertahankan respons

Risiko Tidak Berimbang



- Beban risiko keuangan dan operasional yang tidak proporsional ditanggung oleh LSM dan mitra-mitranya

Dampak Panjang Pandemi



- Prospek kemunduran ekonomi yang memengaruhi kemampuan LSM dalam menutupi biaya yang diperkirakan tidak mungkin ditalangi oleh bantuan hibah pembangunan maupun donasi individu saat ini dan di masa depan (paska pandemi)

Mengurangi Kapasitas



- Jalan sempit yang tersedia saat ini adalah mengurangi kapasitas yang ada yang dapat menjadi bencana besar bagi kemampuan LSM dalam merespons baik jangka pendek maupun jangka panjang kebutuhan masyarakat yang meningkat sebagai akibat dari pandemi

Syarat–Syarat Model Pembiayaan Baru

Kolaborasi Multi Sektor



- Kolaborasi lintas sektor, dengan memanfaatkan bidang keahlian dan kapasitas LSM di berbagai sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat sipil

Antisipatif



- Mekanisme pendanaan antisipatif yang memungkinkan pendanaan tersedia di muka pada skala yang mampu menanggapi kebutuhan mendesak hingga berkembang dan menyesuaikan diri seiring dengan perubahan kebutuhan dan konteks yang menyertainya

Memiliki Sarana Investasi



- Sarana investasi, di mana model pendanaan berorientasi kepada hasil guna mendukung LSM dan masyarakat dampingan mereka secara ekonomi manakala mereka menghadapi pembatasan mobilitas

Likuid

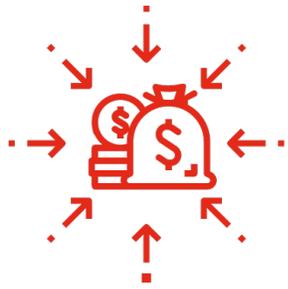


- Dana likuid, yang dapat digunakan oleh dan untuk menutupi pengeluaran tambahan (*overhead costs*) jangka pendek serta potensial dibayar kembali dari waktu ke waktu ketika sumber–sumber pendanaan normal kembali memungkinkan

Berbagi Risiko



- Berbagi risiko, di mana model pendanaan memungkinkan lebih banyak pembagian risiko sehingga LSM tidak menanggung beban keuangan sendiri namun turut ditanggung renteng oleh lembaga donor



Penggabungan Dana

mekanisme pengumpulan atau penggabungan dana [*pooling fund*] yang bersumber dari beberapa lembaga donor dan ditujukan guna mendukung program prioritas tertentu



Pembiayaan Campuran

mekanisme pendanaan yang menggabungkan sumber dana [*blended finance*] dari hibah bantuan lembaga donor dengan pembiayaan sektor swasta demi tujuan bersama



Pendanaan Inti

dukungan pendanaan bagi lembaga penerima hibah untuk digunakan bagi pembiayaan program dan kegiatan utama [*core support*], termasuk biaya *overhead*



Kebal Korupsi

upaya menyalurkan bantuan secara cepat dan efisien dianggap sangat menantang sebab mesti berhadapan dengan dilema risiko korupsi yang dapat menurunkan efektivitas bantuan

Model Pendanaan

Karakteristik yang diharapkan	Obligasi (bonds)	Dana Perwalian (trust fund)	Dana Abadi (endowment)
Preferensi dari LSM			
Kolaborasi lintas-sektor	***	—	**
Antisipatif	—	***	***
Sarana Investasi	***	—	***
Likuid	—	***	***
Berbagi risiko	***	—	—
Score	9	6	11

Tabel 1. Preferensi model pendanaan LSM | Diolah oleh penulis.

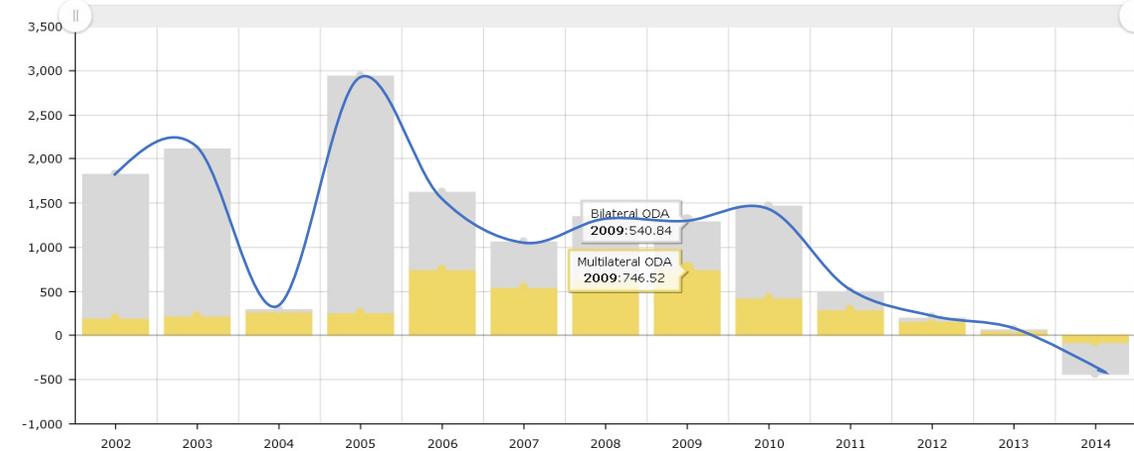
Karakteristik yang diharapkan	Obligasi (bonds)	Dana Perwalian (trust fund)	Dana Abadi (endowment)
Preferensi dari lembaga pendonor			
Kebal terhadap korupsi	**	*	*
Core support	—	*	**
Blended finance	***	**	**
Pooled fund (multi-partner)	—	—	*
Score	5	4	6

Tabel 2. Preferensi model pendanaan lembaga donor | Diolah oleh penulis. Catatan: bentuk pendanaan dan penilaian hanyalah identifikasi dan proyeksi pengamalan (*exercise*) penulis terhadap potensi sumber pendanaan.

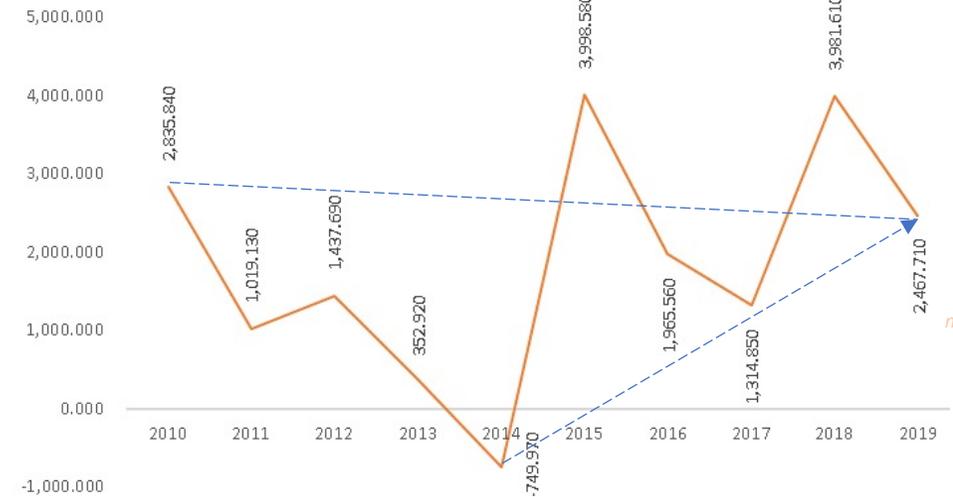
Indonesia

SOURCE: OECD | DATA: Components of ODA | VIEW: Components of Net ODA Disbursements (by calendar year in US\$M)

Components of Net ODA Disbursements (by calendar year in US\$M)



Indonesia, US Dollar, Millions



Indonesia Total Official Development Flows | OECD Stat, diakses pada 27 dan 28 Juli 2021



Lini masa Perjalanan Kebijakan Pendanaan



- UU 2/2010 tentang APBNP 2010 menyepakati Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) untuk pembentukan Dana Abadi

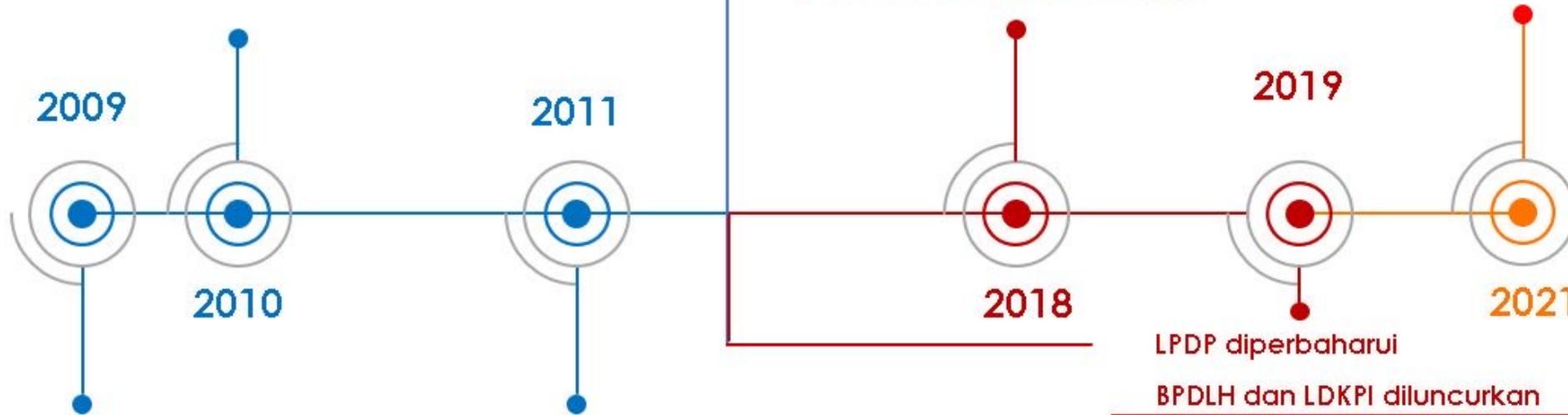
- Perpres 16/2018 memperkenalkan Swakelola Tipe (3) bagi LSM, Ormas, Org. Profesi dan PTS
- Perpres 77/ 2018 terbit tentang Pendanaan Lingkungan Hidup
- UU 12/2018 tentang APBN 2019 mengalokasikan Dana Abadi pertama untuk LDKPI

- Sesuai PMK 24/2021 BPD LH resmi menggunakan nomenklatur Indonesian Environment Fund
- UU 9/ 2020 tentang APBN 2021 menambah dana abadi IndonesianAID hingga total dana kelolaan Rp 5 Triliun
- ICCTF memulai pendanaan campuran

Inisiasi Dana Abadi Pendidikan

Kebijakan Swakelola (3) terbit Dana Lingkungan Hidup terbit

Indonesian Environment Fund



Belum ada Dana yang diperuntukkan bagi LSM Indonesia

meskipun Pemerintah sudah meluncurkan

"IndonesianAID"

Dana Perwalian Perubahan Iklim | ICCTF diluncurkan

- ICCTF diluncurkan Pemerintah untuk mengordinasikan dan mengharmonisasikan pembiayaan perubahan iklim

Dana Bantuan Hukum terbit

- UU 16/ 2011 tentang Bantuan Hukum terbit dan memandatkan Pendanaan Bantuan Hukum
- Perpres 80/2011 tentang Dana Perwalian terbit

LPDP diperbaharui

BPD LH dan LDKPI diluncurkan

- Perpres 12/2019 Dana Abadi Pendidikan terbit
- UU 20/ 2019 tentang APBN 2020 memperluas investasi Dana Abadi mencakup Dana Abadi Pendidikan, Penelitian, Kebudayaan dan Perguruan Tinggi
- BPD LH diluncurkan sebagai pusat pembiayaan (financial hub) sumber daya lingkungan
- LDKPI/ IndonesianAID diluncurkan sebagai badan bantuan pembangunan asing milik Indonesia

Kebijakan Pendanaan LSM Indonesia

Bentuk	Payung Hukum	Skema	Struktur	LSM Penerima Manfaat
Dana Perwalian Perubahan Iklim ICCTF	Peraturan Presiden	Trust fund (Dana Perwalian)	Majelis Dana Amanat	LSM Pengelola
			Pengelola Dana Amanat	LSM Pelaksana
Dana Bantuan Hukum	Undang-undang	APBN/ D	Perencanaan organik	Ormas
		DIPA K/ L/ Pemda	Pemerintah/ Pemda	Organisasi Bantuan Hukum
		Hibah	Panitia Verifikasi/ Akreditasi	Lembaga Bantuan Hukum
		Sumber lain yang tidak mengikat		
Dana Swakelola Tipe [3]	Peraturan Presiden	APBN/ D	Perencanaan organik	Ormas
		DIPA K/ L/ Pemda	Pemerintah/ Pemda	LSM
			Perencanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah	Organisasi Profesi PTS
Dana Lingkungan Hidup Indonesian Environment Fund	Peraturan Presiden	Pooling fund (Dana Gabungan)	Komite Pengarah	Pemerintah
		Trust fund (Dana Perwalian)		Sektor Swasta
		Revolving fund (Dana Bergulir)		Organisasi Masyarakat Sipil
		BLU		Lembaga Pendidikan/ Penelitian
				Kelompok Masyarakat
		Individu		

Kebijakan Pendanaan Lainnya | Pembanding

Dana Abadi Pendidikan LPDP	Peraturan Presiden	Endowment (Dana Abadi)	Dewan Penyantun	WNI
		BLU	Dewan Pengawas	WNA
			Lembaga	
Dana Kerja sama Pembangunan Internasional IndonesianAID	Peraturan Menteri Keuangan	Endowment (Dana Abadi)	Komite Pengarah	Negara Asing
		BLU		LSM Asing

mbhoelman@gmail.com

Kesimpulan

- Proses transformasi LSM
- Koherensi kerja LSM dengan Rencana Kerja Pemerintah
- Minimnya perhatian negara terhadap LSM sebagai aktor pembangunan — stabilitas ekonomi jangka panjang
- Cara pandang terbatas mengenai pendanaan LSM

Rekomendasi

- Jangka Pendek; kanal pendanaan dari mitra pendanaan yang ada dan beroperasi di Indonesia-konsorsium LSM ataupun kementerian terkait sebagai lembaga perantara
- Jangka Menengah; pembentukan lembaga IndoCSO Fund dan dana abadi untuk ketahanan LSM
- Jangka Panjang; obligasi dampak sosial (obligasi gotong royong)